

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Surastowo

towosuras@gmail.com

Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan yang menjadi sample adalah Laporan Keuangan Tahun 2014-2018. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2014-2018, rata-rata rasio efektifitas sebesar 78,99% yang termasuk pada kriteria kurang efektif. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 99,02%, yang termasuk pada kriteria efisien. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebesar 73,21%, sedangkan rasio keserasian belanja modal sebesar 15,75%. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan positif. Sedangkan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur, pola hubungan seluruhnya adalah instruktif, rata-rata 5,86 % atau kurang dari 25%. Hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih tinggi.

Kata Kunci : Analisis Kinerja, Pengelolaan, Keuangan Daerah.

I. PENDAHULUAN

Tahun 1998 di Indonesia terjadi reformasi pada segala bidang, tidak terkecuali reformasi pada bidang keuangan. Pemerintah melakukan perombakan peraturan keuangan negara dengan mengganti seluruh peraturan yang lama dan bersama Dewan Perwakilan rakyat (DPR) mengeluarkan satu paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Paket undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan di Indonesia.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah seharusnya ditunjukkan pada kemampuan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya yaitu dengan besarnya peranan PAD dalam

pembiayaan daerah pada APBD daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2002) masalah yang sering timbul pada upaya peningkatan PAD adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga pendapatan daerah belum dapat dipungut secara optimal.

Pertanggungjawaban kinerja keuangan menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap hasil dari kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dianggarkan dan direalisasikan (Halim, 2004). Interpretasi atas hasil perhitungan rasio keuangan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk melihat perbedaannya.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan pendekatan analisis rasio keuangan. “Apakah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2014 sampai dengan 2018 sudah baik ?.

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002). Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan (Hery, 2015: 162).

Terdapat beberapa cara dalam mengukur kinerja keuangan daerah, salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah, Adapun rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain sebagai berikut :

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio efektifitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan
2. Rasio Efisiensi, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
3. Rasio Keserasian, rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

4. Rasio pertumbuhan, rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Erlina (2007:64), "Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain." Menurut Sugiyono (2012:13), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2012:8) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori diatas, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan

metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Kabupaten Lampung Timur berdiri yaitu dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2018. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dengan mempertimbangkan tujuan dan fokus penelitian pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Menurut arikunto (2006) dokumentasi adalah cara mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalh, notulen, raport, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik, dan dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

III. HASIL PENELITIAN

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektifitas PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018.

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Kriteria
2014	86.855.359	83.131.971	95,71%	Cukup Efektif
2015	90.391.025	84.496.936	93,48%	Cukup Efektif
2016	106.785.510	94.924.247	88,89%	Kurang Efektif
2017	215.971.472	111.886.192	51,81%	Tidak Efektif
2018	132.489.811	125.035.523	94,37%	Cukup Efektif

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) adalah rasio menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio Efisiensi ini yaitu :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018.

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2014	1.550.572.554	1.512.492.030	97,54%	Efisien
2015	1.673.230.554	1.733.408.499	103,60%	Tidak efisien
2016	1.916.378.911	1.922.657.369	100,33%	Tidak Efisien
2017	2.017.656.162	1.947.368.023	96,52%	Efisien
2018	2.051.436.200	2.002.789.116	97,63%	Efisien

3. Rasio Keserasian

Berikut adalah hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasi :

Tabel 3 : Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018.

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Keseraian Belanja Operasi
2014	1.298.206.002	1.512.492.030	85,83%
2015	1.477.231.918	1.733.408.499	85,22%
2016	1.263.379.318	1.922.657.369	65,71%
2017	1.279.784.183	1.947.368.023	65,72%
2018	1.356.855.384	2.002.789.116	67,75%

Hasil perhitungan rasio keserasian pada belanja modal sebagai berikut :

Tabel 4 : Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018.

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Keseraian Belanja Modal
2014	213.723.169	1.512.492.030	14,13%
2015	255.907.955	1.733.408.499	14,76%
2016	364.083.387	1.922.657.369	18,94%
2017	321.795.859	1.947.368.023	16,52%
2018	285.430.669	2.002.789.116	14,25%

4. Rasio Pertumbuhan

Pada tabel dibawah ini merupakan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 5 : Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi PAD Tahun N	Realisasi PAD Tahun N-1	Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan PAD
2014	83.131.971	40.476.211	42.655.760	105,38%
2015	84.496.936	83.131.971	1.364.965	1,64%
2016	94.924.247	84.496.936	10.427.311	12,34%
2017	111.886.192	94.924.247	16.961.945	17,87%
2018	125.035.523	111.886.192	13.149.331	11,75%

Tabel 6 : Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun N	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun N-1	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
2014	1.550.572.554	1.366.829.394	183.743.160	13,44%
2015	1.673.230.554	1.550.572.554	122.658.000	7,91%
2016	1.916.378.911	1.673.230.554	243.148.357	14,53%
2017	2.017.656.162	1.916.378.911	101.277.251	5,28%
2018	2.051.436.200	2.017.656.162	33.780.038	1,67%

Tabel 7 : Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja Operasi Tahun N	Realisasi Belanja Operasi Tahun N-1	Pertumbuhan Belanja Operasi	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
2014	1.298.206.002	1.193.125.206	105.080.796	8,81%
2015	1.477.231.918	1.298.206.002	179.025.916	13,79%
2016	1.263.379.318	1.477.231.918	213.852.600	-14,48%
2017	1.279.784.183	1.263.379.318	16.404.865	1,30%
2018	1.356.855.384	1.279.784.183	77.071.201	6,02%

Tabel 8 : Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja Modal Tahun N	Realisasi Belanja Modal Tahun N-1	Pertumbuhan Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
2014	213.723.169	216.970.477	- 3.247.308	-1,50%
2015	255.907.955	213.723.169	42.184.786	19,74%
2016	364.083.387	255.907.955	108.175.432	42,27%
2017	321.795.859	364.083.387	- 42.287.528	-11,61%
2018	285.430.669	321.795.859	- 36.365.190	-11,30%

Tabel 9 : Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Belanja Tahun N	Realisasi Belanja Tahun N-1	Pertumbuhan Belanja	Rasio Pertumbuhan Belanja
2014	1.512.492.030	1.410.275.163	102.216.867	7,25%
2015	1.733.408.499	1.512.492.030	220.916.469	14,61%
2016	1.922.657.369	1.733.408.499	189.248.870	10,92%
2017	1.947.368.023	1.922.657.369	24.710.654	1,29%
2018	2.002.789.116	1.947.368.023	55.421.093	2,85%

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rumus untuk mengukur rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sedangkan hasil dari perhitungan terhadap rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10 : Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 – 2018

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Transfer	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2014	83.131.971	1.410.275.163	5,89%	Instruktif
2015	84.496.936	1.512.492.030	5,59%	Instruktif
2016	94.924.247	1.733.408.499	5,48%	Instruktif
2017	111.886.192	1.922.657.369	5,82%	Instruktif
2018	125.035.523	1.947.368.023	6,42%	Instruktif

IV. PEMBAHASAN

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan perhitungan yang telah disebutkan pada hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pajak dan redistribusi daerah masih belum cukup baik. Pada tahun 2014 dan 2015 rasio efektifitas cukup efektif, namun pada tahun 2016 rasio efektifitas berubah menjadi kurang efektif dan pada tahun 2017 tidak efektif, walaupun pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2018 rasio efektifitas kembali menjadi cukup efektif.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang harus dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin besar rasio efisiensi, maka kinerja keuangan dikatakan tidak efisien. Pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan pada tahun 2014 Rasio Efisiensi terhitung efisien yaitu sebesar 97,54%. Rasio ini berubah pada

Tahun 2015 dan Tahun 2016 menjadi tidak efisien

3. Rasio Keserasian

Terdapat dua rasio keserasian, yakni rasio keserasian belanja operasi dan rasio keserasian belanja modal. Dari hasil perhitungan yang telah disajikan pada tabel 7 diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jika dirata-rata rasio keserasian belanja operasi diperoleh angka 74,73%. Perhitungan ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur lebih banyak dipergunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk pembangunan fisik. Hal ini tidak dapat dihindari oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dikarenakan dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Pada tahun 2018, peruntukan terbesar dari belanja operasi adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 82,61% dari total belanja operasi.

4. Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan, realisasi pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan positif

meskipun fluktuatif. Jika dirata-rata pertumbuhan PAD selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,38%. Begitu pula pada sisi pendapatan daerah, mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Rasio pertumbuhan pendapatan terbesar yakni pada tahun 2016 sebesar 14,53% dan terendah pada tahun 2018 yang hanya sebesar 1,67%. Rasio pertumbuhan belanja operasi selama tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami pertumbuhan positif dan hanya sekali mengalami pertumbuhan negative, yaitu pada tahun 2016 sebesar – 14,48%.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, pola hubungan seluruhnya adalah instruktif, rata rata 5,86 % atau kurang dari 25%. Pola hubungan instruktif, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur efektif, efisien, pertumbuhan positif, tetapi jumlah rasio belanja operasi terhadap belanja modal masih tinggi. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan belanja operasi lebih tinggi dari belanja modal. Namun demikian, hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa factor seperti belanja gaji dan tunjangan. Hasil perhitungan rasio kemandirian

keuangan daerah bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar dapat menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan memaksimalkan peran organisasi-organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pendapatan

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

BPS Kabupaten Lampung Timur. 2015. *Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Lampung Timur, Sukadana.

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Dora, Juliani, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, Universitas Sanata Darma, Yogyakarta

Darsono dan Ashari. 2004. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: ANDI

Faud, Moh. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor

Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. CAPS, Yogyakarta

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba empat

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba empat

- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan*. Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: LAN dan BPKP
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- M. Faishal Hakim. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Puput Risky Pramita. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta
- Rosmiaty Tarmizi, Khairudin, Ayu Jayadi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Memperoleh Opini WTP*. Lampung : Universitas Bandar Lampung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Universitas Muhammadiyah Metro. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro : UM Metro

- Universitas Muhammadiyah Metro. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro : UM Metro
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentng Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah